

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM ASEAN DEFENCE MINISTERIAL MEETING (ADMM)

INDONESIA DEFENCE DIPLOMACY ON ASEAN DEFENCE MINISTERIAL MEETING (ADMM)

Yudi Rusfiana¹

IPDN & Universitas Pertahanan Indonesia
(yudirusfiana@ymail.com)

Abstrak – Diplomasi pertahanan telah menjadi fenomena yang cukup menyita perhatian baik dalam konsepsi diplomasi maupun dalam perkembangan teoritis dan praktis. Asia Tenggara pun dalam hal ini telah memiliki ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM) yang merupakan wadah bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk menjalankan diplomasi pertahanan. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat aktif terlibat dalam ADMM untuk menjalankan diplomasi pertahanannya. Penulis melihat bahwa keterlibatan aktif dari Indonesia dalam ADMM tidak dapat dilepaskan dari bagaimana Indonesia berupaya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya khususnya dalam bidang pertahanan. Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai agenda dan kepentingan yang diusung oleh Indonesia dalam menjalankan diplomasi pertahanan dalam ADMM. Agenda dan kepentingan yang diusung oleh Indonesia terkait dengan kepentingan menjaga stabilitas keamanan di Asia Tenggara dan mendapatkan dukungan dalam penyelesaian berbagai permasalahan keamanan Internal seperti terorisme dan keamanan maritimnya. Penulis akan membahas masalah yang diangkat dalam jurnal ini melalui sudut pandang Indonesia sebagai pihak yang memiliki kepentingan untuk mengimplementasikan diplomasi pertahanan melalui ADMM. Pembahasan dalam jurnal ini menitikberatkan kepada diplomasi pertahanan multilateral yang saat ini belum mendapatkan perhatian yang luas karena anggapan bahwa diplomasi pertahanan hanya dilakukan secara bilateral dengan hal-hal yang senantiasa bersifat teknis semata.

Kata Kunci : diplomasi pertahanan, ADMM, Asia Tenggara

Abstract – Defense diplomacy has become a phenomenon that get enough attention both in the conception of diplomacy as well as in the development of theoretical and practical. Southeast Asia for that matter should have the ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM) which is a forum for countries in Southeast Asia to run the defense diplomacy. Indonesia is one country that is very actively involved in for the ADMM run defense diplomacy. The author notes that the active involvement of Indonesia in the ADMM can not be separated from how Indonesia seeks to meet its national interests, especially in the field of defense. This paper aims to discuss the agenda and the interests pursued by Indonesia in implementing defense diplomacy in the ADMM. Agendas and interests pursued by Indonesia related to the interests of maintaining security and stability in Southeast Asia and gain support in the completion of various internal security issues such as terrorism and maritime security. The author will discuss the issues raised in this paper through the

¹ Alumnus Program Pascasarjana UNPAD, Bandung, Lektor Pada Institut Pemerintahan Dalam negeri, Jatinangor Bandung; Dosen Universitas Pertahanan Indonesia.

viewpoint of Indonesia as a party who has an interest to implement defense diplomacy through the ADMM. The discussion in this paper focuses on the defense of multilateral diplomacy that has yet to gain widespread attention because of the assumption that the only defense diplomacy is done bilaterally with the things that always purely technical nature.

Keywords : *defense diplomacy, ADMM, Southeast Asia*

Pendahuluan

Asia Tenggara telah lama menjadi salah satu kawasan yang sangat strategis khususnya secara geopolitik. Kondisi ini membawa konsekuensi terhadap banyaknya kepentingan-kepentingan asing yang kemudian tidak jarang berbenturan dengan kepentingan negara-negara yang berada didalam kawasan. Kepentingan ini senantiasa didominasi dengan upaya negara-negara luar untuk menciptakan stabilitas didalam kawasan untuk kepentingan keamanan bagi negaranya yang harus berhadapan dengan kepentingan pertahanan negara-negara yang berada didalam kawasan tersebut. Kondisi ini diperkuat pula dengan gelombang globalisasi yang kemudian mengaburkan sekat-sekat kawasan yang menimbulkan apa yang disebut integrasi kawasan dalam berbagai bidang yang berkonsekuensi pada interdependensi dari negara-negara di dalam kawasan.

Dinamika kawasan terkait dengan keamanan dan pertahanan membawa konsekuensi mengenai perilaku dari negara-negara khususnya yang berada di Asia Tenggara. *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* memang telah memberikan dasar berperilaku negara-negara di dalamnya, satu dengan lainnya maupun dengan kekuatan eksternal yang menekankan kepada kerja sama serta membangun rasa saling percaya (*Confidence Building Measurement*) khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari relasi sejarah konflik yang dimiliki oleh negara-negara di dalam kawasan itu sendiri khususnya negara-negara besar seperti Malaysia dan Indonesia.² Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai sebuah negara besar di kawasan ini dan menjadi penyeimbang bagi dinamika keamanan kawasan.

Sejarah panjang terkait dengan relasi konfliktual yang ada diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya negara-negara besar didalamnya tidak serta merta hilang pasca terbentuknya ASEAN. Gesekan-gesekan senantiasa terjadi diantara negara-

²Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 15.

negara besar seperti Indonesia dan Malaysia, Thailand dengan Kamboja dan masih banyak contoh lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa mentalitas konfliktif masih cukup kuat melekat kepada perilaku negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Perilaku konfliktif tersebut berpotensi besar menimbulkan munculnya konflik bersenjata yang berdampak kepada instabilitas keamanan di dalam kawasan serta memancing masuknya kekuatan-kekuatan asing untuk terlibat dalam konflik tersebut.

Bagi Indonesia, dinamika keamanan kawasan Asia Tenggara memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepentingan pertahanan yang ingin dicapai. Oleh karena itu diperlukan sebuah upaya untuk mengkomunikasikan kepentingan pertahanan tersebut kepada negara-negara di kawasan. Komunikasi ini menjadi sangat penting mengingat kekhawatiran akan terjadinya misinterpretasi dari negara-negara di dalam kawasan terhadap kebijakan pertahanan Indonesia. Hal ini pada akhirnya berpotensi membawa instabilitas keamanan di kawasan terkait dengan timbulnya rasa saling curiga diantara sesama negara di kawasan maupun dengan negara di luar kawasan. Rasa saling curiga tersebut tidak dapat dilepaskan dari mentalitas konfliktif seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Oleh karena itu, pada tahun 2006 dibentuk *ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM)* sebagai mekanisme yang dapat digunakan sebagai wadah komunikasi terkait dengan permasalahan serta kebijakan pertahanan di antara negara-negara Asia Tenggara.

Keberadaan ADMM menjadi salah satu penopang bagi terbangunnya salah satu pilar ASEAN Community yang akan diterapkan pada tahun 2015 yakni *ASEAN Political and Security Community (APSC)*. Salah satu dasar dalam pembentukan sebuah komunitas dalam kawasan adalah rasa saling percaya antara satu dengan lainnya. Demikian pula dalam pilar komunitas politik dan keamanan, unsur utama dalam hal ini adalah rasa saling percaya bahwa kebijakan pertahanan yang dikeluarkan oleh sebuah negara bukan ditujukan untuk mengancam negara lain dalam komunitas tersebut. Maka dalam hal ini ADMM memainkan peranan signifikan dalam upaya untuk memperkuat pilar *ASEAN Community* dalam bidang politik dan keamanan.

ADMM dalam hal ini tidak hanya memiliki signifikansi terhadap keamanan kawasan semata dalam mempercepat kohesi kawasan dan menjaga stabilitas di dalam kawasan. ADMM menjadi sebuah instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara yang

berada di kawasan Asia Tenggara untuk menjalankan diplomasi pertahanan mereka. Demikian pula dengan Indonesia yang melihat bahwa keberadaan ADMM dapat menjadi sebuah instrumen strategis bagi Indonesia untuk menjalankan diplomasi pertahanan secara multilateral baik terhadap seluruh negara di Asia Tenggara maupun terhadap negara-negara di luar kawasan. Berangkat dari hal tersebut, dalam tulisan ini, penulis akan membahas mengenai signifikansi ADMM dalam diplomasi pertahanan yang dijalankan oleh Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional yang ada di kawasan Asia Tenggara.

Tulisan ini melihat bagaimana Indonesia berupaya untuk mengamankan dan mencapai kepentingan nasionalnya terkait dengan mensosialisasikan kebijakan pertahanan domestik maupun upaya untuk menciptakan keamanan dalam negeri dan terkait dengan kepentingan untuk memainkan peranan penting dalam struktur keamanan di Asia Tenggara melalui ADMM. Diplomasi pertahanan melalui ADMM menjadi menarik karena implementasi dari diplomasi pertahanan khususnya yang dilakukan oleh Indonesia masih sangat minim. Kajian mengenai diplomasi pertahanan masih dilakukan dalam tataran yang sangat umum khususnya terkait dengan kajian teoritis dan konseptual serta menitikberatkan kepada diplomasi yang masih bersifat bilateral dan sangat teknis. Diplomasi pertahanan bilateral senantiasa mengedepankan sisi kerja sama dalam bidang pembelian alutsista, pertukaran perwira, transfer teknologi dan lain-lain. Padahal esensi dari diplomasi bukan hanya dilakukan pada tataran bilateral namun juga dalam tataran multilateral.

Dinamika Lingkungan Strategis di Asia Tenggara

Keamanan telah menjadi sebuah permasalahan kompleks yang sangat dinamis. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika interaksi antar aktor dalam politik global yang semakin hari semakin kompleks. Kompleksitas dari interaksi ini, terkait dengan munculnya aktor-aktor baru yang terlibat dalam keamanan yang saat ini, tidak lagi difokuskan pada aktor negara namun juga perlu memperhatikan peran dari aktor non-negara seperti organisasi kejahatan transnasional, kelompok teroris. Bahkan saat ini kita dapat melihat

munculnya aktor-aktor transnasional dan aktor non negara yang memiliki kapasitas aksi secara global yang mempengaruhi dinamika keamanan.³

Kecenderungan keamanan Asia Tenggara yang dihadapi adalah terjadinya pergeseran pada permasalahan keamanan regional, seperti adanya berbagai konflik yang bersumber dari klaim teritorial, keamanan jalur komunikasi laut dan jalur perdagangan melalui laut, sampai kepada masalah keamanan non-tradisional seperti terorisme, perompakan dan pembajakan di laut, penyelundupan senjata, migrasi ilegal, ataupun penangkapan ikan ilegal.⁴ Selain itu, hal tersebut juga sangat dipengaruhi oleh negara-negara yang mendiami kawasan, dinamika keamanan kawasan, khususnya kawasan Asia Tenggara ikut dipengaruhi oleh kekuatan negara-negara besar karena adanya kepentingan mereka di Asia Tenggara.

Kondisi ini pun menjadi salah satu fenomena yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, sebagai sebuah kawasan yang memiliki letak geografis yang strategis perubahan-perubahan pola interaksi antar negara maupun dengan negara di luar kawasan sangatlah dinamis, khususnya dalam tataran keamanan. Berakhirnya Perang Dingin membawa konsekuensi terhadap keamanan di Asia Tenggara, dimana Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan hegemoni yang berupaya untuk menjalin berbagai kerjasama keamanan dikawasan sebagai langkah penetrasi negara tersebut dalam mengamankan kepentingan nasional dan menanamkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Hal ini bersambut dengan munculnya kampanye “*war against terror*” pada awal tahun 2001 yang berdampak kepada kebijakan keamanan negara-negara di Asia Tenggara yang terfokus kepada upaya untuk memberantas aktivitas teroris yang disinyalir banyak bergerak di Asia Tenggara. Aktivitas teroris yang ada di kawasan Asia Tenggara merupakan bagian dari kelompok teroris global Al-Qaeda yang tengah diperangi oleh AS dan sekutunya. Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina menjadi negara dengan tingkat kerentanan tinggi akan aktivitas dan aksi kelompok-kelompok teroris tersebut.

³ Anak Agung Banyu Perwita, “Hakekat, Prinsip dan Tujuan Pertahanan-Keamanan Negara”, dalam T. Hari Prihatono dan Anak Agung Banyu Perwita (Editor), *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, (Jakarta : Propatria Institute, 2006), hlm.26.

⁴ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia : Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, (Jakarta : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2003), hlm. 17.

Beberapa tahun belakangan, dinamika keamanan di Asia Tenggara kembali berubah seiring dengan munculnya Cina sebagai kekuatan baru di Asia yang mengarahkan kebijakannya di kawasan Asia Tenggara khususnya terkait dengan kepentingan di Laut Cina Selatan. Cina terus memodernisasi militernya dan merubah fokusnya ke kawasan Selatan, dimana secara khusus, Cina sangat meningkatkan kekuatan Angkatan Lautnya, dalam rangka memfokuskan pada Laut Cina Selatan, sebuah wilayah yang di klaim Cina sebagai teritorinya.⁵ Kondisi ini tentu saja harus dihadapi dan dikelola dengan baik oleh negara-negara yang berada di Asia Tenggara, karena apabila tidak, konsekuensi ancaman keamanan terkait dengan konflik bersenjata akan sangat berpotensi untuk terjadi baik antara Cina dan AS sebagai kekuatan eskternal maupun antara Cina dengan negara-negara di Asia Tenggara yang juga memiliki klaim kepemilikan wilayah di Laut Cina Selatan.

Bagi Indonesia, hal ini merupakan sebuah tantangan, khususnya dalam menciptakan stabilitas keamanan domestik maupun cita-cita untuk menciptakan keamanan dunia. Hal ini tercermin dalam pemikiran Presiden Soeharto yang menyatakan bahwa keamanan nasional merupakan kunci bagi keamanan regional merupakan modal dasar bagi terbinanya perdamaian dunia.⁶ Tentu saja, hal ini akan terkait dan resiprokal satu dengan lainnya. Bila keamanan regional terganggu maka secara otomatis keamanan nasional maupun perdamaian dunia akan terancam. Oleh karena itu, Indonesia senantiasa berupaya untuk memelihara keamanan di kawasan Asia Tenggara dengan berbagai cara khususnya melalui dialog-dialog konstruktif baik dengan sesama negara Asia Tenggara maupun dengan negara lain di luar kawasan.

Diplomasi Pertahanan Indonesia: Konsep dan Tujuan Pencapaian

Diplomasi telah menjadi sebuah bagian penting dalam interaksi antara bangsa yang memiliki tujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau kepentingan bangsa/ negaranya yang berada di luar negaranya. Diplomasi telah menjadi salah satu bagian vital dalam kehidupan negara dan merupakan sarana utama dalam menangani masalah-masalah

⁵ Dewi Triwahyuni, Signifikansi Kawasan Asia Tenggara Dalam Kepentingan Amerika Serikat, *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol. 9 No.1, 2010, hlm. 41.

⁶ Indria Samego, "Perkembangan Lingkungan Strategis dan Potensi Ancaman Terhadap Pertahanan Negara", dalam T. Hari Prihatono dan Anak Agung Banyu Perwita (Editor), *op.cit*, hlm. 49.

internasional agar dapat dicapai suatu perdamaian dunia. Diplomasi merupakan suatu cara berkomunikasi yang dilakukan antar berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui, dimana praktek-praktek negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional.⁷ Dalam prakteknya, diplomasi senantiasa digelar dengan mengedepankan sisi-sisi persuasif dibandingkan dengan tindakan-tindakan yang bersifat koersif, meskipun hal tersebut bisa digunakan sebagai bagian dalam upaya diplomasi.

Dalam perkembangannya, diplomasi kemudian tidak hanya melibatkan para diplomat dengan perundingan maupun negosiasi elitis semata, namun juga melibatkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki oleh sebuah negara. Dewasa ini, diplomasi dilakukan dengan melakukan berbagai pembicaraan dalam sebuah forum multilateral untuk membicarakan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah terkait dengan masalah keamanan dan pertahanan di luar bentuk aliansi atau kerja sama pertahanan. Diplomasi ini sebagian besar dijalankan oleh pihak yang terkait dengan angkatan bersenjata sebuah negara, kementerian terkait maupun para pakar yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Hal ini yang dalam perkembangannya kemudian memulai diplomasi pertahanan yang banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia.

Diplomasi pertahanan menjadi sebuah konsep dalam upaya untuk menjalankan diplomasi melalui instrumen militer tanpa menggunakan kekerasan, namun sebagai sebuah instrumen persuasi. Merujuk kepada Andrew Cottey dan Anthony Forster, dimana diplomasi pertahanan memiliki arti upaya untuk meningkatkan hubungan dan mencegah terjadinya konflik dengan musuh potensial dan menggali pelajaran yang dari pihak lain terkait dengan masalah-masalah pertahanan.⁸ Sebagai contoh adalah bagaimana kemudian pelajaran yang dapat diambil dari hubungan militer yang dilakukan oleh negara-negara Barat dengan Rusia dan Cina sejak tahun 1990an dan disimpulkan bahwa hal ini merupakan relevansi yang lebih luas, dimana diplomasi pertahanan sebagai instrumen untuk pencegahan konflik. Diplomasi pertahanan dapat juga diartikan sebagai upaya untuk membangun atau memperkuat persepsi mengenai kepentingan bersama.

⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik : Teori dan Kasus*, (Bandung : Alumni, 1995), hlm. 2.

⁸ Andrew Cottey dan Anthony Forster, *Reshaping Defence Diplomacy : New Roles for Military Cooperation and Assistance*, (New York : Oxford University Press, 2009), hlm. 65.

Pankaj Kumar Jha, menjelaskan secara konseptual mengenai diplomasi pertahanan yang terkait dengan ruang lingkup cakupan yakni baik didalam negeri maupun di luar negeri. Dimana hal ini terkait dengan upaya untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan dengan cara mengubah perilaku dan persepsi dari negara lain.⁹ Konsepsi ini yang kemudian ingin dicapai oleh Indonesia. Keinginan ini tidak dapat dilepaskan dari upaya Indonesia untuk mengubah perilaku negara lain agar tidak menunjukkan sikap permusuhan dalam kebijakan pertahanan baik kepada Indonesia maupun kepada negara-negara lain dikawasan yang berpotensi menimbulkan instabilitas. Disamping itu, Indonesia pun berupaya untuk mengubah persepsi negara lain agar tidak menganggap bahwa kebijakan pertahanan yang diambil oleh Indonesia sebagai sebuah gestur ancaman yang dapat mengganggu stabilitas kawasan.

Diplomasi pertahanan yang kemudian dijalankan oleh Indonesia saat ini telah menjadi sebuah instrumen penting dalam kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri Indonesia baik dalam cakupan nasional, regional dan global. Secara kekuatan persenjataan, Indonesia memang belum memiliki keistimewaan yang dapat diberikan kepada negara lain sebagai bentuk bantuan yang merupakan bentuk tradisional dari diplomasi pertahanan. Namun, dalam hal ini Indonesia memiliki pengalaman serta reputasi yang dapat digunakan sebagai mentor bagi negara-negara lain untuk meningkatkan kapasitas prajurit maupun organisasi angkatan bersenjata. Hal ini sejalan dengan perluasan dari ruang lingkup diplomasi pertahanan dimana kerja sama dan bantuan militer sebagai bagian dari diplomasi pertahanan dilakukan dalam rangka mendukung negara-negara mitra dalam upaya meningkatkan kapasitas angkatan bersenjata sehingga dapat terlibat dalam operasi perdamaian yang digelar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB.¹⁰

ASEAN Defence Ministerial Meeting : Mekanisme Diplomasi Pertahanan Indonesia di Asia Tenggara

Sejarah pembentukan ASEAN tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk meredam potensi konflik bersenjata yang muncul diantara negara-negara anggotanya, meskipun belum

⁹Pankaj Jumar Jha, "India Defence Diplomacy in Southeast Asia", *Focus*, Vol. 5, No. 1, 2001, hlm. 47-63.

¹⁰Andrew Cottey dan Anthony Forster, "Introduction", *Adelphi Papers*, Vol. 44 : 365, (New York : Routledge, 2004), hlm. 7.

sepenuhnya dapat dihilangkan, namun hal ini dianggap sebagai solusi bagi terciptanya stabilitas keamanan di Asia Tenggara.¹¹ Hal ini berhasil dicapai dengan mengedepankan prinsip “ASEAN Ways” dalam berbagai penyelesaian masalah yang dilakukan dengan menggelar berbagai dialog dan kesepakatan yang dicapai melalui konsensus di antara negara-negara di ASEAN. Hal ini yang kemudian masih dipegang secara teguh oleh negara-negara ASEAN dalam upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang keamanan. ASEAN memiliki pilar yang mengamanatkan bahwa tidak diperkenankannya kerja sama pertahanan dalam bentuk aliansi, namun lebih mengedepankan kepada kerja sama bilateral maupun multilateral di antara negara kawasan.

Menjelang pembentukan *ASEAN Community* yang salah satu pilarnya adalah *ASEAN Political and Security Community (APSC)* yang kemudian menghasilkan *APSC Action Plan* pada pertemuan ke 10 KTT ASEAN di Vietnam pada 2004. Dalam bidang pertahanan, ASEAN perlu untuk bekerja sama dengan menggelar pertemuan rutin melalui mekanisme *ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM)*. ADMM pertama kali digelar pada tahun 2006 dengan mengambil tempat di Kuala Lumpur. ADMM merupakan kerangka untuk menggelar dialog dan mencapai kerjasama dalam bidang praktis untuk menangani masalah yang terkait dengan keamanan baik yang bersifat tradisional dan non-tradisional termasuk didalamnya adalah masalah keamanan maritim, penanganan bencana dan respon darurat, operasi perdamaian, *peace-building* pasca konflik, bantuan kemanusiaan dan kerja sama dalam bidang lainnya.

Tujuan maupun mekanisme yang terdapat dalam ADMM tersebut jelas menjadi sarana bagi negara-negara di ASEAN untuk menjalankan diplomasi pertahanan dalam level regional maupun dalam level yang lebih global. Hal ini merujuk kepada kondisi dimana dalam diplomasi pertahanan terdapat beberapa aktivitas yang terkait dengan hal tersebut di atas. Salah satunya yang relevan dengan pembahasan dalam tulisan ini adalah kunjungan dari menteri dan anggota militer maupun personil sipil dalam semua level dan pembicaraan diantara staf angkatan bersenjata dalam bentuk konferensi dan seminar

¹¹Donald E. Weatherbee, *International Relations in Southeast Asia*, (Plymouth : Rowman & Littlefield Publishing, 2009).

untuk meningkatkan kesepahaman satu dengan yang lain.¹² Kegiatan-kegiatan tersebut yang kemudian senantiasa menjadi agenda rutin yang digelar dalam setiap penyelenggaraan ADMM setiap tahunnya.

Bagi negara-negara ASEAN, ADMM akan membentuk dan meningkatkan rasa saling kepercayaan dan pengertian khususnya dalam bidang keamanan dan pertahanan sehingga tidak menimbulkan rasa saling curiga yang berujung kepada munculnya instabilitas kawasan. Selain itu dengan terbukanya ADMM, untuk masuknya partisipan dari luar dengan adanya ADMM +1 yang memayungi dialog dengan 8 mitra yang digelar di Bandar Seri Bangawan, Brunei pada Agustus 2013. Keberadaan dari ADMM + 1 ini tidak lain adalah untuk mencegah adanya kesalahan dalam realitas diplomasi pertahanan yang pada akhirnya dapat menghambat proses yang ada dalam ADMM. Selain itu, hal ini juga merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kredibilitas dan sentralitas ASEAN dalam mengelola hubungan dengan kekuatan eksternalnya.¹³ Hal ini menjadi sangat penting mengingat ASEAN dianggap sebagai mitra strategis bagi kekuatan di luar kawasan untuk mencapai kepentingan-kepentingannya khususnya dalam bidang keamanan.

Bagi Indonesia sendiri, ADMM menjadi salah satu mekanisme yang sangat efektif dalam mengimplementasikan diplomasi pertahanan. Hal ini terkait dengan sifat dari ADMM yang merupakan forum multilateral yang mempertemukan sesama negara di Asia Tenggara maupun dengan negara-negara di luar kawasan melalui mekanisme ADMM plus. Indonesia memanfaatkan berbagai dialog konstruktif yang digelar untuk menyampaikan berbagai kebijakan pertahanan yang terkait dengan respon Indonesia terhadap dinamika keamanan baik yang berasal dari dalam kawasan, dari dinamika keamanan global serta dinamika keamanan domestik yang ada di Indonesia.

Melalui dialog konstruktif tersebut selain dapat menyampaikan dan mensosialisasikan kebijakan pertahanan kepada negara lain di Asia Tenggara maupun di luar negara Asia Tenggara, juga dilakukan untuk mendapatkan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan pertahanan

¹²Temasak Chalermpanupap dan Mayla Ibanez, "ASEAN Measures in Combating Piracy and Other Maritime Crimes", dalam *Piracy and International Maritime Crimes in ASEAN : Prospect for Cooperation*, Robert C Beckman dan J. Ashlet Roach (ed.), (Massachusetts : Edward Elgar Publishing, 2012).

¹³Temasak Chalermpanupap, "ASEAN Defence Diplomacy and The ADMM Plus", *ISEAS Perspective*, No.49, Agustus 2013, hlm.3.

tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan pertahanan sebuah negara, demikian pula dengan Indonesia, harus menghadapi berbagai hambatan serta tantangan baik pada tataran domestik maupun pada tataran hubungan dengan negara lain. Hambatan domestik terkait dengan keterbatasan pada sistem persenjataan yang dimiliki untuk menjalankan sebuah platform kebijakan pertahanan maupun terkait dengan teknologi yang dimiliki. Hambatan pada tataran hubungan dengan negara lain adalah terkait dengan sulitnya untuk menyamakan persepsi terhadap kebijakan pertahanan yang diambil oleh Indonesia.

Kepentingan dan Agenda Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam ADMM

Sejatinya diplomasi yang dilakukan oleh sebuah negara adalah untuk menyampaikan kebijakan luar negeri terhadap negara lain demi mencapai kepentingan nasionalnya. Demikian pula yang kemudian menjadi landasan dari dilaksanakannya diplomasi pertahanan oleh pemerintah Indonesia. Indonesia telah melaksanakan diplomasi pertahanan dengan beberapa negara secara bilateral dengan strategi serta agenda yang berbeda. Dalam kesempatan ini, penulis akan memaparkan mengenai diplomasi pertahanan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia secara multilateral dalam kerangka ADMM. Bagi Indonesia, ADMM memiliki dua arti strategis yakni pertama sebagai upaya untuk mempererat hubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara khususnya dalam bidang pertahanan. Kedua, untuk menjalankan peranan sebagai stabilisator kawasan Asia Tenggara dari masuknya kepentingan-kepentingan pihak asing khususnya dalam bidang keamanan yang bila tidak dikelola dengan baik akan mengancam kepentingan nasional Indonesia.

Diplomasi pertahanan menjadi hal yang cukup signifikan bagi Indonesia untuk terlibat aktif dalam membentuk arsitektur keamanan di Asia Tenggara. Kondisi ini terkait dengan permasalahan yang dalam beberapa waktu terakhir mengganggu citra dan postur pertahanan Indonesia. Permasalahan yang mengganggu citra pertahanan Indonesia adalah kurang memadainya Alat Utama Sistem Persenjataan yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan Indonesia. Indonesia yang dahulu menjadi salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara bahkan Asia, harus menerima kenyataan pahit saat ini secara kualitas dan

kuantitas tertinggal dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kondisi ini tentu saja mengurangi kredibilitas Indonesia, khususnya terkait dengan peran sebagai stabilisator kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini membuat Indonesia perlu untuk memperkuat kembali perannya di Asia Tenggara, khususnya dalam bidang keamanan. Oleh karena itu, dalam pertemuan ADMM ke-5 pada Mei 2011 yang bertempat di Jakarta, hal ini terkait erat dengan eksistensi peran Indonesia sebagai ketua ASEAN pada tahun 2011.

Bagi Indonesia, upaya untuk membangun kembali sistem pertahanan dengan memperkuat Alutsista menjadi salah satu keharusan yang tidak dapat ditunda lagi. Melalui program *Minimum Essential Forces* (MEF) menjadi upaya untuk membangun kekuatan pertahanan minimum bagi TNI pada tiga matryanya. Kebijakan ini tidak hanya dapat dilihat dalam dampak secara internal terhadap peningkatan postur pertahanan Indonesia. Namun hal ini, memiliki dampak negatif kepada negara-negara tetangga di Asia Tenggara, apabila kebijakan ini tidak dikomunikasikan dengan baik terhadap mereka. Sejarah konflik yang terbentuk diantara negara-negara di Asia Tenggara sangat mungkin akan menimbulkan kecurigaan apabila negara tetangganya kemudian melakukan pembangunan sistem pertahanan dengan memperbaharui atau menambah Alutsista.

Pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia sebagai sebuah kebijakan pertahanan yang harus diimplementasikan untuk mengejar ketertinggalan alutsista dengan negara-negara lain. Dalam hal ini, Indonesia tentu saja harus mendatangkan berbagai alutsista dari negara lain maupun dengan menjalin kerja sama pertahanan dengan negara lain demi tercapainya tujuan tersebut. Kebijakan seperti ini tidak jarang akan menimbulkan kekhawatiran dari negara lain terhadap perilaku tersebut ditujukan untuk mempersiapkan diri untuk menyerang negaranya. Terlebih mentalitas konfliktif masih sangat mungkin muncul sebagai prespektif dalam memandang kebijakan yang diambil oleh Indonesia untuk memodernisasi sistem pertahanannya tersebut.

Indonesia dalam hal ini, memerlukan dukungan dan prespektif yang baik dalam upaya mengimplementasikan berbagai program pembaharuan maupun pengadaan persenjataan untuk kepentingan pertahanan melalui platform MEF. Hal ini dapat diwujudkan melalui ADMM karena dalam hal ini, Indonesia yang kemudian diwakili oleh Menteri Pertahanan dapat menjelaskan program-program maupun platform kebijakan yang terkait dengan pertahanan yang diambil oleh Indonesia secara terbuka kepada para

menteri pertahanan negara-negara Asia Tenggara dan negara luar yang berpartisipasi dalam ADMM. Penjelasan ini akan mampu untuk meredam berbagai kecurigaan dan meyakinkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara bahwa kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam bidang pertahanan bukan ditujukan untuk mengancam mereka.

Bagi Indonesia, diplomasi pertahanan melalui ADMM dengan tujuan untuk meredam kecurigaan dari negara tetangga mengenai kebijakan pembangunan sistem pertahanan dengan melakukan modernisasi alutsista menjadi sangat penting. Hal ini terkait dengan adanya berbagai masalah yang tergolong sensitif yang melibatkan Indonesia dengan negara tetangga yang dalam hal ini adalah Malaysia terkait dengan sengketa wilayah perbatasan. Dengan kondisi demikian kebijakan Indonesia tersebut bisa berpotensi untuk memicu terjadinya perlombaan senjata (*arms race*) di kawasan Asia Tenggara yang tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi keamanan dan stabilitas kawasan. Bila perlombaan tersebut terjadi, maka hal ini akan menjadi kemunduran bagi upaya untuk membangun komunitas ASEAN pada tahun 2015.

ADMM menjadi sarana juga bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk melakukan dan mengembangkan kerja sama pertahanan diantara mereka maupun dengan kekuatan di luar kawasan. Pengembangan kerjasama pertahanan oleh Indonesia selain dimaksudkan untuk memperkuat CBM, juga ditujukan untuk membangun dan memperkuat kekuatan pertahanan Indonesia. Kerja sama pertahanan dalam bingkai diplomasi pertahanan Indonesia, kinerjanya akan lebih optimal di kawasan bila hal tersebut disertai dukungan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pertahanan sendiri, dengan dukungan kemampuan alutsista yang baik serta dengan adanya evaluasi kebijakan kerja sama pertahanan itu sendiri. Diharapkan melalui peningkatan kerja sama pertahanan Indonesia di kawasan Asia Tenggara guna mendukung diplomasi pertahanan dalam rangka mewujudkan stabilitas kawasan dapat terwujud.¹⁴

Stabilitas kawasan dapat diciptakan dengan CBM yang diharapkan akan dicapai dalam ADMM dapat mengubah *pattern of enmity* (kecurigaan dan permusuhan) menjadi *pattern of amity* (persahabatan dan kepercayaan) dari negara-negara di dalam maupun di

¹⁴Salim, "Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan Dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan", dalam <http://www.pusjimar-seskoal.tni.mil.id.pdf>., diunduh pada 8 Juli 2014.

luar kawasan yang ikut berpartisipasi didalamnya. Dinamika kawasan di Asia Tenggara dalam konteks kekinian dengan munculnya *enmity* dan *amity* tersebut telah menunjukkan bahwa konsepsi *regional complex*¹⁵ yang dikemukakan oleh Barry Buzan perlu dikelola dengan baik agar tidak memunculkan dominasi dari pola *enmity* seperti saat sebelum ASEAN terbentuk.

Melalui kepercayaan yang terbangun sebagai hasil dari diplomasi pertahanan yang dilakukan dalam bingkai ADMM, Indonesia memiliki keleluasaan serta membuka peluang untuk memperkuat sistem pertahanan dengan menjalin kerja sama yang lebih erat dengan mitra di kawasan maupun dengan mitra dari luar kawasan. Selain itu, ADMM dapat menjadi instrumen untuk memperkenalkan produk alutsista yang telah mampu diproduksi oleh Indonesia. Indonesia saat ini telah mampu memproduksi senjata serbu varian SS-1 dan SS-2, panser Anoa, serta Pesawat Patroli. Dalam ADMM Indonesia akan memiliki banyak kesempatan untuk menjelaskan mengenai keunggulan dari produk-produk industri pertahanan Indonesia kepada negara lain. Dengan demikian maka kesempatan untuk membuka pasar atas produk industri pertahanan dalam negeri akan lebih luas. Pembukaan pasar industri pertahanan ini akan menjadi hal yang sangat strategis karena akan menjadi prasyarat bagi perkembangan industri pertahanan dalam negeri yang saat ini tengah menjadi perhatian untuk menunjang pembangunan sistem pertahanan Indonesia.

Dengan demikian, upaya-upaya diplomasi sangat penting dalam ADMM ini, terlebih peran Indonesia sebagai negara yang memimpin usaha-usaha perdamaian dan keamanan di wilayah ASEAN dan untuk lebih meningkatkan kerja sama penyelesaian semua konflik regional, kapasitas kesenjangan, dan mengkaji kemajuan kerja sama dalam keamanan maritim, kedokteran militer, bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, operasi pemeliharaan perdamaian dan kontra-terorisme.¹⁶ Tidak dipungkiri bahwa ADMM bukan hanya untuk kepentingan secara eksternal yang kemudian harus dicapai oleh Indonesia didalamnya, namun juga kepentingan yang sifatnya domestik yakni keamanan nasional.

¹⁵Barry Buzan, *People, States and Fear : An Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War Era*, (London : MacMillan Press London, 1987).

¹⁶Jamin Ginting, "Ketentuan Hukum Global Yang Berdampak Nasional : Bagaimana Menghadapinya?", *Law Review*, Vol. XII, No.2, 2012, hlm. 277-289.

Keamanan nasional Indonesia mendapatkan beberapa tantangan terkait dengan permasalahan terorisme. Indonesia menjadi wilayah dimana aktivitas kelompok radikal yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas keamanan dengan melancarkan berbagai serangan baik terhadap simbol negara asing maupun simbol pemerintah Indonesia. Kesulitan utama yang kemudian dihadapi untuk mencegah dan menetralsir ancaman ini adalah pergerakan dari kelompok ini yang sering berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengajak negara-negara di Asia Tenggara untuk membantu Indonesia dalam menangani masalah tersebut. Hal ini dapat dilakukan dalam kerangka ADMM dimana dalam mekanisme ini, Indonesia melalui menteri pertahanan memiliki kesempatan untuk meyakinkan bahwa terorisme yang ada di Indonesia hanya dapat diatasi dengan kerjasama yang erat dengan negara-negara di ASEAN. Hal ini akan jauh lebih efektif dibandingkan dilakukan secara bilateral serta akan mendapatkan pemahaman yang sama terkait dengan adanya mekanisme diskusi didalam ADMM tersebut.

ADMM juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia untuk mengkomunikasikan kebijakan terkait dengan upaya untuk menangani masalah separatisme yang tengah dihadapi oleh Indonesia. Indonesia senantiasa dinilai melakukan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap upaya untuk menangani masalah separatisme. ADMM dapat menjadi ajang bagi Indonesia untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan dalam menangani separatisme dan meluruskan berbagai tuduhan terkait pelanggaran HAM yang dialamatkan kepada TNI pada khususnya. Selain itu dalam hal ini Indonesia dapat berbagai pengalaman dengan negara lain yang memiliki permasalahan separatisme. Pertukaran pengalaman ini menjadi penting untuk mencari solusi maupun strategi dalam menangani masalah separatisme yang saat ini dihadapi khususnya di Papua dengan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Demikian pula dengan urgensi dari kepentingan maritim Indonesia. Indonesia dapat mengkomunikasikan berbagai program terkait dengan upaya pengamanan kepentingan maritimnya melalui mekanisme ADMM. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat Indonesia didominasi perbatasan di wilayah laut yang berbatasan langsung dengan negara lain. Pengakuan terhadap kebijakan maritim akan mengoptimalkan

implementasi dari kebijakan tersebut dilapangan karena diasumsikan bahwa negara-negara lain telah memiliki kesepahaman mengenai kebijakan yang diambil oleh Indonesia.

Kesepahaman dengan negara lain mengenai kebijakan maritim Indonesia yang terkait dengan masalah pertahanan memiliki urgensi bagi Indonesia terkait dengan permasalahan potensi konflik maupun konflik yang melibatkan Indonesia. Indonesia memiliki konflik perbatasan laut dengan Malaysia terkait dengan wilayah Ambalat. Melalui ADMM ini Indonesia dapat melakukan berbagai pembicaraan dengan Malaysia terkait dengan upaya penyamaan persepsi mengenai platform penarikan garis batas yang dimiliki oleh kedua negara. ADMM akan menjadi mekanisme Indonesia untuk melakukan peredaaan konflik serta mencari solusi bersama atas masalah yang tengah dihadapi. Hal ini dapat dilakukan karena dilakukan dalam mekanisme yang terbuka dimana setiap negara peserta dapat memberikan pandangan serta masukan terkait dengan penyelesaian permasalahan yang tengah dihadapi oleh Indonesia pada khususnya maupun oleh negara lain bila hal tersebut kemudian terjadi kembali.

Bagi Indonesia, ADMM bukan hanya menjadi sarana untuk berbagi dalam upaya untuk menangani permasalahan yang terkait dengan keamanan yang bersifat tradisional semata namun juga terkait dengan untuk merespon dinamika ancaman yang muncul dalam level global. Bagi Indonesia, bencana menjadi salah satu masalah besar yang saat ini harus dihadapi. Hal ini terkait dengan munculnya berbagai bencana alam yang melanda Indonesia, dimana hal ini perlu untuk mendapatkan perhatian. Indonesia melalui ADMM dituntut untuk mampu menyerap berbagai mekanisme penanggulangan bencana serta merancang sebuah mekanisme multilateral dalam penanggulangan bencana baik yang terjadi di Indonesia maupun yang terjadi di negara lain. Indonesia dapat memberikan pengalaman terkait dengan penanggulangan bencana yang dalam banyak kasus melibatkan pihak TNI sebagai platform utama dalam melakukan aktivitas tersebut.

Perkembangan tipologi konflik saat ini telah membawa permasalahan baru, khususnya dalam metode penanggulangannya. Tipe konflik horizontal atau perang internal dalam skala besar belum menunjukkan eksistensinya di Asia Tenggara namun potensi ini bukan berarti tidak dapat terjadi di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu mekanisme Operasi Perdamaian yang senantiasa digelar oleh PBB berupaya untuk diadopsi untuk penanganan konflik tersebut bila terjadi di kawasan. Indonesia sebagai

sebuah negara yang telah lama berkecimpung dalam operasi perdamaian PBB dianggap sebagai model untuk berbagi pengalaman dan pelatihan dalam metode pelaksanaan operasi perdamaian. Indonesia menyadari bahwa potensi konflik internal maupun konflik antar negara perlu untuk mendapatkan perhatian serta penanganan bila hal tersebut telah terjadi.

Kebutuhan akan kemampuan menggelar operasi perdamaian dikawasan membuat Indonesia harus mampu untuk membagi pengalamannya kepada negara-negara lain. Mekanisme kerja sama dalam metode penggelaran operasi perdamaian dapat dilakukan dalam kerangka ADMM. Melalui kerangka ADMM, negara-negara lain dapat menjajaki kerja sama dengan Indonesia dalam penggelaran operasi perdamaian baik dari segi pendidikan maupun pelatihan secara langsung oleh TNI. Dengan demikian, Indonesia dapat menunjukkan dirinya sebagai negara yang terdepan dalam kemampuan penggelaran operasi perdamaian dan terdepan dalam memberikan inisiatif untuk membentuk mekanisme operasi perdamaian dalam konteks kawasan. Hal ini menjadi penting mengingat bila terjadi konflik di dalam kawasan, mekanisme penyelesaian harus dilakukan secara internal oleh negara-negara di dalam kawasan untuk menghindari masuknya pihak asing.

Indonesia menyadari bahwa dalam hal ini, diplomasi pertahanan yang dilakukan dalam kerangka ADMM tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan domestiknya tetapi juga terkait erat dengan kepentingan Indonesia dikawasan Asia Tenggara maupun pada tataran global. Diplomasi pertahanan yang diusung oleh Indonesia juga memiliki agenda untuk mengembalikan peran Indonesia dalam struktur keamanan di Asia Tenggara meskipun saat ini kemampuan pertahanan Indonesia belum pulih sepenuhnya dari dampak embargo persenjataan yang diterapkan oleh AS sejak tahun 1990an yang lalu. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan kemampuan Indonesia dalam berbagai latihan yang terkait dengan penanggulangan berbagai ancaman yang telah disetujui dalam forum ADMM. Dengan demikian, Indonesia akan kembali diakui sebagai negara besar yang memiliki peran dan kemampuan dalam mengelola keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Kesimpulan

ADMM telah menjadi sebuah mekanisme yang cukup signifikan bagi Indonesia untuk mencapai berbagai kepentingan nasional dimana hal tersebut dilakukan dengan mengimplementasikan diplomasi pertahanan. Meskipun kemudian, bagi sebagian besar pengamat dan akademisi ADMM hanya sekedar *talk shop*. Namun dalam hal ini, mekanisme yang ada dalam ADMM sangat relevan untuk membentuk dan menyamakan persepsi diantara negara-negara yang terlibat didalamnya dalam memandang dinamika keamanan kawasan serta kebijakan pertahanan dari negara-negara ASEAN dalam menghadapi dinamika keamanan tersebut. Bagi Indonesia, pandangan yang sama terhadap dinamika keamanan kawasan dan pemahaman terhadap kebijakan pertahanan yang dijalankan Indonesia menjadi sangat penting untuk menghindarkan kecurigaan serta potensi konflik. Hal ini dapat terjadi mengingat Indonesia tengah berupaya untuk menata dan memperbaharui sistem pertahanan yang terkait dengan modernisasi Alutsista melalui platform MEF. Selain itu, diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dalam ADMM dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan serta bantuan baik saran maupun teknis terhadap berbagai permasalahan keamanan domestik yang dihadapi oleh Indonesia. Dengan demikian Indonesia akan lebih efektif dalam menetralsir berbagai ancaman dalam tataran domestik tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Buzan, Barry. 1987. *People, States and Fear : An Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War Era*. London : MacMillan Press London.
- Cipto, Bambang. 2006. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cottey, Andrew dan Anthony Forster. 2004. *Reshaping Defence Diplomacy : New Roles for Military Cooperation and Assistance*. New York : Oxford University Press.
- Chalermphanupap, Temasak dan Mayla Ibanez. 2012. "ASEAN Measures in Combating Piracy and Other Maritime Crimes", dalam , Robert C Beckman dan J. Ashlet Roach (ed.). *Piracy and International Maritime Crimes in ASEAN : Prospect for Cooperation*. Massachusetts : Edward Elgar Publishing.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2003. *Buku Putih Pertahanan Indonesia : Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*. Jakarta : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Perwita, Anak Agung. 2006. "Hakekat, Prinsip dan Tujuan Pertahanan-Kemampuan Negara" dalam T. Hari Prihatono dan Anak Agung Banyu Perwita (ed). *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*. Jakarta : Propatria Institute.
- Samego, Indria. 2003. "Perkembangan Lingkungan Strategis dan Potensi Ancaman Terhadap Pertahanan Negara", dalam T. Hari Prihatono dan Anak Agung Banyu Perwita (ed). *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*. Jakarta : Propatria Institute.
- Suyokusumo, Sumaryo. 1995. *Hukum Diplomatik : Teori dan Kasus*. Bandung : Alumni.
- Weatherbee, Donald E. 2009. *International Relations in Southeast Asia*. Plymouth : Rowman & Littlefield Publishing.

Jurnal

- Cottey Andrew dan Anthony Forster. 2004. "Introduction". *Adelphi Papers*. Vol. 44 :365. New York : Routledge.
- Chalermphanupap, Temasak. 2013. "ASEAN Defence Diplomacy and The ADMM Plus". *ISEAS Prespective*. No.49. Agustus.
- Ginting, Jamin. 2012. "Ketentuan Hukum Global Yang Berdampak Nasional : Bagaimana Menghadapinya?". *Law Review*. Vol. XII. No.2.
- Jha, Pankaj Jumar. 2001. "India Defence Diplomacy in Southeast Asia". *Focus*. Vol. 5. No. 1.
- Triwahyuni, Dewi. 2010. "Signifikansi Kawasan Asia Tenggara Dalam Kepentingan Amerika Serikat". *Majalah Ilmiah UNIKOM*. Vol. 9. No.1

Website

- Salim, "Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan Dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan", dalam <http://www.pusjimar-seskoal.tni.mil.id.pdf>, diunduh pada 8 Juli 2014.

